



Analisis Implementasi Kebijakan “Food Estate” Dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah

Arjena Nayunda Risdianto¹, Felix Marshal Jotham², Nurdin³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Abstrak

Implementasi kebijakan "Food Estate" merupakan program kebijakan yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia khususnya dalam konteks memastikan ketahanan nasional selama pandemi. Pada pengimplementasiannya, program “Food Estate” tersebut menimbulkan kontroversi terkait dampak lingkungan dan konflik tanah dengan masyarakat adat dan petani lokal khususnya di Kalimantan Tengah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program food estate di daerah tersebut mengalami kegagalan karena kurangnya pembelajaran dari pengalaman sebelumnya dan kurangnya perencanaan yang matang. Diperlukan pendekatan berbasis dialog, konsultasi, dan solusi yang adil yang melibatkan semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah ketahanan pangan dan ketahanan nasional di wilayah tersebut secara berkelanjutan dan adil. Program food estate memiliki dampak lingkungan dan sosial yang perlu diperhatikan, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program sangat penting untuk membangun dukungan publik yang solid dan mengurangi potensi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika dari implementasi dan keberlanjutan kebijakan Food Estate di Kalimantan Tengah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka ini kemudian dianalisis secara kritis.

Kata Kunci: Food Estate, Ketahanan Pangan, Perlindungan Lahan.

Abstrak

Implementation of the "Food Estate" policy is a policy program proposed by the Minister of Defense aimed at increasing food production in Indonesia, especially in the context of ensuring national resilience during the pandemic. During its implementation, the "Food Estate" program caused controversy regarding environmental impacts and land conflicts with indigenous communities and local farmers, especially in Central Kalimantan. Previous research shows that food estate programs in the area have failed due to a lack of learning from previous experiences and a lack of careful planning. An approach based on dialogue, consultation and fair solutions that involves all parties involved is needed to resolve food security and national resilience problems in the region in a sustainable and fair manner. Food estate programs have environmental and social impacts that need to be taken into account, and community participation in program planning and implementation is critical to building solid public support and reducing the potential for conflict. This research aims to analyze the dynamics of the implementation and sustainability of Food Estate policies in Central Kalimantan using qualitative research methods by collecting data from library sources and then analyzing them critically.

Password: Food Estate, Food Security, Land Protection.

How to Cite: Risdianto, A.N., Jotham, F.M., and Nurdin. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan “Food Estate” Dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah. 3(1), hal. 50-59

*Corresponding author: Arjena Nayunda Risdianto

E-mail: 2110413168@mahasiswa.upnvj.ac.id

PENDAHULUAN

Berawal Pada tanggal 9 Juli 2020, Presiden Joko Widodo memberikan tugas kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, untuk mengawasi pelaksanaan proyek food estate nasional di sejumlah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 148.000 hektare (Amirullah, 2020). Dengan berfokus pada konsep keamanan pangan, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi proyek food estate nasional tersebut, terutama dalam konteks memastikan ketahanan nasional selama pandemi. Food estate merupakan salah satu strategi yang sesuai untuk diterapkan dalam situasi pandemi, di mana wabah penyakit adalah bentuk ancaman yang tidak biasa terhadap ketahanan nasional. Isu ketahanan pangan di Indonesia telah menjadi salah satu masalah geopolitik dalam negeri yang mendesak, dan pengelolaannya masih jauh

dari memuaskan (Global Hunger Index, 2019). Ini diperparah oleh jumlah penduduk yang besar di Indonesia dan kebutuhan akan pangan yang tinggi. Selain itu, situasi pandemi COVID-19 telah memicu peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian tentang ancaman krisis pangan global. Ini juga bermaksud mengusulkan kepada Lemhannas agar mempertimbangkan ketahanan pangan sebagai salah satu elemen kunci dalam menjaga ketahanan nasional, terutama ketika menghadapi ancaman yang tidak biasa di masa depan.

Masalah ketahanan pangan di Kalimantan Tengah adalah permasalahan yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang komprehensif serta penanganan yang hati-hati. Salah satu isu utama adalah proyek food estate nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2020. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia, tetapi telah menimbulkan kontroversi yang signifikan. Pembukaan lahan yang luas untuk pertanian besar-besaran telah berdampak serius pada lingkungan, seperti deforestasi dan degradasi tanah. Ini berarti ada perluasan masalah di luar ketahanan pangan, yakni dampak lingkungan yang harus diperhitungkan secara serius.

Selain itu, proyek food estate juga memunculkan konflik tanah yang melibatkan masyarakat adat dan petani lokal. Banyak dari mereka yang merasa kehilangan akses terhadap tanah yang merupakan mata pencaharian mereka selama bertahun-tahun. Konflik agraria ini menjadi faktor tambahan yang memperumit situasi di Kalimantan Tengah. Penting untuk diingat bahwa ketahanan pangan tidak hanya tentang produksi pangan, tetapi juga melibatkan distribusi yang adil, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Proyek food estate harus diukur dalam konteks ini, sehingga efektivitasnya dalam mencapai ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan dapat dinilai.

Ketika kita berbicara tentang ketahanan nasional, ini mencakup banyak aspek lain, seperti keamanan, ekonomi, dan politik. Implementasi proyek food estate harus sejalan dengan elemen-elemen ini agar dapat benar-benar mendukung ketahanan nasional yang lebih luas. Ini berarti bahwa penanganan masalah di Kalimantan Tengah tidak hanya perlu melibatkan aspek ketahanan pangan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan, hak-hak masyarakat adat, dan kontribusi terhadap ketahanan nasional yang holistik (P.J.H. van Beukering et al, 2008)

.Dalam menyelesaikan masalah ini, perlu ada pendekatan yang berbasis dialog, konsultasi, dan solusi yang adil yang melibatkan semua pihak yang terlibat. Ini akan memungkinkan pencarian solusi yang komprehensif yang mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan yang ada di Kalimantan Tengah. Hanya dengan demikian, kita dapat berharap untuk menyelesaikan masalah ketahanan pangan dan ketahanan nasional di wilayah ini secara berkelanjutan dan adil.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Amrina Nur Izzati, Beatriks Liku Gustiawati Dan Rizal Yoga Saputra (2023) dengan judul riset “Proyek food estate pada lahan eks pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah: perlu atau tidak?”. Dalam penelitian tersebut, penulisnya menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode literatur review. Kesamaan antara penelitian sebelumnya tersebut dengan penelitian yang kami tulis ini terlihat pada objek penelitian yang sama yaitu konteks dampak dari adanya pembukaan lahan khususnya dalam menganalisis program kebijakan dari pemerintah yaitu “*food estate*” dan lokasi penelitian sama-sama dianalisis di daerah Kalimantan Tengah.

Penelitian sebelumnya dengan judul implementasi program Food Estate di desa bahaur tengah, kecamatan kahayan kuala, kabupaten pulang pisau yang ditulis oleh Ode Mahardhika, Nurul Azkar & Erma Ariyani pada tahun 2023. Penelitian tersebut menggunakan teori dari Sinkule & Ortolano dalam (Swanson et al 2001) bahwa penerapan model kebijakan dari Sinkule & Ortolano melibatkan tiga pihak yang berinteraksi, yakni Otoritas Pelaksana, Pihak Terkait, dan Usaha-Usaha Pedesaan. Menggunakan metode Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan jenis penelitian lapangan, mengacu pada sumber

seperti Creswell (2014) dan Dharma (2008). Penelitian ini didasarkan pada pandangan konstruktivisme yang bertujuan untuk lebih memahami aspek sosiokultural dengan mempercayai dalam sebesar mungkin pandangan yang diberikan oleh partisipan tentang situasi yang tengah diinvestigasi., penelusuran dilakukan pada Scopus dengan menggunakan kata kunci terkait food estate, dengan batas tahun terbit 2021 hingga 2023, sebanyak 10 artikel berhasil diidentifikasi dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan software VOSviewer. Hasil penelitiannya menunjukkan Kesimpulan dari kutipan tersebut adalah bahwa program food estate di desa Bahaur Tengah mengulangi kegagalan program serupa di masa lalu karena kurangnya pembelajaran dari pengalaman sebelumnya, kurangnya perencanaan yang matang, dan beberapa tujuan program tidak tercapai sepenuhnya. Ilmu Administrasi Publik dapat berperan dalam membawa program ini ke masyarakat melalui pendekatan budaya, dengan tujuan menghindari nasib serupa dengan program-program sebelumnya. Beberapa tujuan program food estate di Kalimantan Tengah harus diutamakan, seperti membangun kerjasama desa untuk menciptakan lumbung pangan dan mengatasi kendala akses ke lahan sawah petani, misalnya dengan mengatasi masalah transportasi menuju lahan. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat lebih berhasil dan mendapat dukungan masyarakat (Ode Mahardika & dkk, 2023).

Penelitian sebelumnya dengan judul Peran Mediasi Kepuasan Kerja Pada Pengaruh Dukungan Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang ditulis oleh Marbun, H.S., & Jufrizen, J. (2022). Penelitian tersebut Menggunakan teori (Pianda, 2018) kinerja adalah sebuah kata dalam Bahasa Indonesia dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing adalah prestasi, bisa pula berarti hasil kerja menggunakan teori Membahas peran mediasi kepuasan kerja pada pengaruh dukungan organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai "Pengaruh Dukungan Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dimediasi Kepuasan Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara" memberikan beberapa temuan krusial. Pertama, terlihat bahwa dukungan organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Dalam hasil penelitiannya itu, lingkungan kerja juga turut memainkan peran penting dengan pengaruhnya yang signifikan terhadap kinerja pegawai di lembaga tersebut. Selanjutnya, ditemukan bahwa kepuasan kerja berfungsi sebagai mediator yang signifikan dalam hubungan antara dukungan organisasi dan kinerja pegawai, juga antara lingkungan kerja dan kinerja pegawai. Dalam konteks ini, terlihat bahwa dukungan organisasi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Hal serupa terjadi pada lingkungan kerja, yang juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Terakhir, ditemukan bahwa dukungan organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pegawai, yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Demikian pula, lingkungan kerja juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Oleh karena itu, keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa faktor-faktor ini saling terkait dan memegang peran krusial dalam membentuk kinerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Marbun, H.S., & Jufrizen, J. (2022). Peran Mediasi Kepuasan Kerja Pada Pengaruh Dukungan Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*.

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis implementasi program food estate sebagai solusi ketahanan pangan Indonesia. *Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences*. yang ditulis oleh Rasman, A., Theresia, E.S., & Aginda, D.M. (2023). Berdasarkan penelitian oleh

Mutia et al. (2022), dijelaskan bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, menekankan pentingnya produksi pangan dalam negeri sebagai fokus utama. Hingga saat ini, ketahanan pangan menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan Covid-19. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa praktik food estate di Indonesia telah berlangsung sejak masa orde lama tahun 1955 hingga saat ini, dengan empat proyek mega terhitung, yaitu Proyek Lahan Gambut (PLG) 1 Juta Hektar di Kalimantan Tengah, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua, Delta Kayan Food Estate (DeKaFe) di Kalimantan Utara, dan Ketapang Food Estate di Kalimantan Timur. Tujuan utama food estate di Indonesia adalah meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menciptakan swasembada tani yang mandiri. Namun, implementasinya sering mengalami konflik dan kegagalan. Faktor utama penyebab kegagalan food estate di Indonesia melibatkan kurangnya perencanaan matang, termasuk pemilihan lokasi, ketersediaan air, kondisi iklim, teknologi, dan kurangnya sinergi antara pemerintah dan petani. Masalah kepemilikan lahan dan ketenagakerjaan juga turut berkontribusi pada kegagalan tersebut. Kebijakan atau regulasi pemerintah juga memainkan peran dalam keberhasilan atau kegagalan proyek food estate. Lebih lanjut, program food estate juga menimbulkan masalah lingkungan seperti deforestasi, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, berkurangnya daerah resapan air, dan risiko banjir. Dari kegagalan tersebut, dapat diambil beberapa pembelajaran dan rekomendasi untuk proyek food estate di masa depan, seperti mendorong kedaulatan pangan berbasis pertanian ekologis, melakukan riset kelayakan menyeluruh sebelum pelaksanaan proyek, melibatkan masyarakat setempat, menyediakan teknologi yang sesuai, dan menyusun kebijakan yang mempertimbangkan isu global seperti perubahan iklim dan kenaikan harga pangan. Semua rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menghindari kesalahan dan kegagalan dalam implementasi proyek food estate di Indonesia.

Merujuk pada penulisan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dinamika implementasi program kebijakan "*Food Estate*" di Kalimantan tengah. Dalam implementasi suatu program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tentu terjadi berbagai dinamika serta memiliki berbagai dampak, baik itu dampak pro dan kontra. Begitu juga dalam dalam pelaksanaan program "*Food Estate*" yang juga terdapat berbagai dampak yang pro dan kontra dan kemudian menjadi tantangan tersendiri khususnya terhadap lingkungan, keberlanjutan perlindungan lahan serta ketahanan pangan. Melihat permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti serta mengkaji secara lebih mendalam lagi terkait dengan bagaimana dinamika implementasi serta keberlanjutan dari program kebijakan "*Food Estate*" khususnya di daerah Kalimantan Tengah melalui perspektif perlindungan keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap dinamika implementasi serta mengevaluasi keberlanjutan kebijakan Food Estate di wilayah Kalimantan Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktiknya, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih komprehensif terkait efektivitas dan dampak kebijakan Food Estate di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Menurut Ormrod dan Leedy dkk (Sarosa, 2017), penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena atau kejadian yang diamati sebagaimana adanya, dalam konteks alamiahnya. Penelitian

kualitatif ini bertujuan untuk merinci dan menjelaskan karakteristik serta nuansa yang mungkin terkandung dalam fenomena tersebut, tanpa melakukan manipulasi atau perubahan terhadap subjek penelitian. Penelitian kualitatif dikenal sebagai metode ilmiah yang bersifat holistik dan mendalam, dimana peneliti memainkan peran sentral sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Dalam proses pengumpulan data, peneliti sering kali menggunakan berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik ini dilakukan secara triangulasi untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang dikumpulkan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya peneliti tidak memiliki hipotesis atau kerangka konseptual sebelumnya, melainkan data-data yang diperoleh akan membimbing mereka dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Hasil dari penelitian kualitatif cenderung bersifat kontekstual dan tidak dapat secara langsung digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Sebaliknya, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman makna dan interpretasi yang lebih dalam terhadap fenomena yang sedang dipelajari. Dalam konteks setting penelitian kualitatif, salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah studi pustaka. Dalam metode ini, peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Ini bisa mencakup buku-buku, artikel jurnal, makalah, dan bahkan sumber-sumber online. Data yang dikumpulkan dari sumber-sumber pustaka ini kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan.

Dengan menggunakan metode studi pustaka dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perkembangan teori, tren, dan pemikiran yang berkaitan dengan topik penelitian mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mengkontekstualisasikan temuan-temuan mereka dalam kerangka kerja yang lebih luas dan memahami kontribusi penelitian mereka terhadap pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Implementasi Food Estate di Kalimantan Tengah

Food Estate merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya beras, melalui pengembangan kawasan pertanian skala besar. Program ini telah dilaksanakan di Kalimantan Tengah, salah satu provinsi lain di Indonesia. Implementasi program di Kalimantan Tengah telah dievaluasi melalui berbagai penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi yang ada, menganalisis implementasi, dan mengidentifikasi tantangan dan hambatan. Kajian menemukan bahwa program tersebut telah mampu meningkatkan produksi padi melalui intensifikasi pertanian dan penerapan teknologi, meskipun masih banyak tantangan dan hambatan, seperti keterlambatan pasokan benih dan sarana produksi pertanian, teknis dan sosial. kendala budaya dalam mekanisasi pertanian, tata kelola air yang kurang optimal, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur. Program ini juga menghadapi permasalahan sosial dan budaya, seperti permasalahan kepemilikan tanah dan hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal. Meskipun terdapat tantangan-tantangan ini, pemerintah terus mendukung program ini, dan program ini telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang memberikan pendanaan dan perlindungan hukum bagi program tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran, program Food Estate di Kalimantan Tengah telah mengarah pada pembangunan berbagai infrastruktur pendukung pertanian. Ini termasuk sistem irigasi, jalan, dan fasilitas produksi pertanian. Pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur tersebut, dengan nilai total hampir Rp 800 miliar. Program ini juga menyebabkan intensifikasi pertanian dan penerapan teknologi

sehingga meningkatkan produksi padi. Namun demikian, masih banyak tantangan dan hambatan seperti terhambatnya pasokan benih dan sarana produksi pertanian, kendala teknis dan sosial budaya dalam mekanisasi pertanian, tata kelola air yang kurang optimal, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur. Program ini juga menghadapi permasalahan sosial dan budaya, seperti permasalahan kepemilikan tanah dan hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal. Meskipun terdapat tantangan-tantangan ini, pemerintah terus mendukung program ini, dan program ini telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang memberikan pendanaan dan perlindungan hukum bagi program tersebut.

Program Food Estate di Kalimantan Tengah menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, seperti terhambatnya pasokan benih dan sarana produksi pertanian, kendala teknis dan sosial budaya dalam mekanisasi pertanian, tata kelola air yang kurang optimal, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur. Program ini juga menghadapi permasalahan sosial dan budaya, seperti permasalahan kepemilikan tanah dan hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal. Tantangan-tantangan ini menyebabkan gagalnya beberapa tanaman pangan, seperti singkong, dan tertundanya panen ribuan hektar sawah. Kurangnya sistem irigasi dan terjadinya bencana alam, seperti banjir, juga menghambat pengembangan program ini. Meskipun terdapat tantangan-tantangan ini, pemerintah terus mendukung program ini, dan program ini telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang menyediakan pendanaan dan perlindungan hukum bagi program tersebut.

Program Food Estate di Kalimantan Tengah berdampak pada lahan pertanian di daerah tersebut. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras, melalui pengembangan area pertanian skala besar. Sebagai hasil dari program ini, infrastruktur pendukung pertanian seperti sistem irigasi, jalan, dan fasilitas produksi pertanian telah dibangun. Namun, program ini juga berdampak pada lahan pertanian yang sudah ada sebelumnya. Beberapa lahan pertanian yang sudah ada sebelumnya telah diubah menjadi lahan pertanian skala besar untuk program Food Estate. Selain itu, program ini juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah, seperti kekurangan infrastruktur, kendala teknis dan sosial-budaya dalam mekanisasi pertanian, dan masalah kepemilikan lahan.

Keberlanjutan Implementasi *Food Estate* di Kalimantan Tengah

Program kebijakan Food Estate ini sudah direncanakan untuk mencapai tujuan yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Dari aspek sosial, program kebijakan Food Estate ini akan memperluas lapangan pekerjaan, kemudian dalam aspek ketahanan pangan program Food Estate ini akan mampu untuk mempercepat proses untuk berkontribusi pada peningkatan produksi pangan, serta juga mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Implementasi program kebijakan Food Estate ini dilakukan dengan membuka lahan yang sudah ada sebelumnya dan tidak produktif sehingga tidak perlu melakukan pembakaran pada lahan-lahan gambut. Dalam implementasi kebijakan food estate di Kalimantan Tengah, telah dijabarkan beberapa tantangan serta permasalahan dalam beberapa sektor. Yang menjadi isu di masyarakat khususnya Kalimantan Tengah saat ini berkaitan dengan program kebijakan Food Estate yaitu kebijakan ini dianggap gagal dan mangkrak. Lahan pertanian yang dijadikan lahan program Food Estate di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Gunung Mas, Desa Tewai Baru, terlihat sangat tandus, botak dan tidak ditumbuhi tanaman. Di desa tersebut, program Food Estate menargetkan sekitar 1 juta lahan untuk dijadikan perkebunan singkong sebagai sumber karbohidrat cadangan selain beras. Tetapi fakta di lapangan, lahan di Desa Tewai Baru terlihat sangat kering dan berpasir, sehingga singkong kerdil yang tumbuh sangat memprihatinkan dan tidak layak dikonsumsi. Masyarakat di Desa Tewai Baru khususnya para petani mengatakan mereka tidak pernah diajak untuk turut berpartisipasi dalam membuat kebijakan program Food Estate ini, bahkan banyak lahan milik masyarakat yang digusur dan diambil begitu saja oleh

pemerintah tanpa adanya pemberitahuan serta tanpa adanya ganti rugi dari pemerintah guna mewujudkan kebijakan Food Estate ini. Jika dilihat dalam aspek politik, hal tersebut tentu sangat merugikan masyarakat bahkan melanggar konsep demokrasi karena menyelewengi partisipasi aktif serta hak-hak dari masyarakat terutama para petani dan berujung pada permasalahan kepemilikan tanah dan hak milik masyarakat lokal, penggusuran akibat pemerintah membuka akses terhadap tanah dan lahan tanpa memperhatikan hak masyarakat lokal dan menimbulkan kompetisi. Dengan demikian permasalahan tersebut juga melanggar payung hukum Permen LHK No.24/2020. Program Food Estate ini kemudian dianggap mangkrak karena sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Desa Tewai Baru dalam program Food Estate ini.

Pembukaan lahan untuk membantu mewujudkan program Food Estate dilakukan oleh pemerintah selain mengakibatkan permasalahan dalam konflik kepemilikan lahan, juga menjadi panas karena bagaimana proses dari pemerintah itu melakukan pembukaan tanah atau lahan. Pembukaan lahan atau tanah untuk program Food Estate ini dilakukan dengan rancangan yang dianggap dapat merusak lingkungan. Rancangan tersebut dianggap akan gagal diakibatkan dari kemungkinan terjadinya percepatan dalam proses eksploitasi lingkungan hidup serta deforestasi di Kalimantan Tengah yang sebelumnya juga mengalami kegagalan khususnya dalam proyek PLG. Kemudian permasalahan yang tidak kalah penting dalam program Food Estate di Kalimantan Tengah ini menurut *Greenpeace* yaitu pemerintah tidak melakukan studi kelayakan lahan sebelum merealisasikan pembukaan lahan sehingga program Food Estate ini dianggap sebagai program yang terlalu terburu-buru dan mengacuhkan banyak pihak serta kurang evaluasi. Selain itu, kerusakan lingkungan yang dianggap akan berdampak dari direalisasinya program Food Estate ini yaitu ditebangnya hutan untuk proses pembukaan lahan dan kemudian nantinya akan berdampak dalam mengubah pola pertanian nasional.

Permasalahan yang terjadi pada program kebijakan Food Estate di Kalimantan tengah menjadi sorotan akibat dari banyaknya permasalahan tersebut sehingga mendapatkan banyak pro dan kontra dari berbagai pihak terkait dengan program kebijakan ini. Terdapat beberapa pihak yang menganggap bahwa mangkraknya program Food Estate ini merupakan bagian dari adanya suatu kepentingan politik sehingga pemerintah hanya acuh dan tidak melakukan evaluasi. Hingga saat ini, program kebijakan Food Estate di Kalimantan Tengah mengalami kemangkrakan proyek. Terlihat di beberapa lahan terdapat ekskavator yang terlantar, bahkan banyak terdapat semak-semak liar. Keberlanjutan program kebijakan Food Estate ini menjadi hal serius yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar dapat segera diatasi dan ditemukan solusinya sehingga tidak hanya menjadi proyek yang mangkrak saja, dan akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Relevansi *Food Estate* Dengan Politik Dan Masyarakat

Program Food Estate merupakan program pengembangan pangan di Indonesia yang melibatkan beberapa sektor seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan yang terintegrasi dalam suatu kawasan tertentu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Terdapat beberapa jurnal yang membahas program Food Estate di Indonesia, salah satunya adalah jurnal yang membahas strategi pengembangan Food Estate di Sumatera Barat sebagai lumbung pangan masyarakat. Selain itu, terdapat juga jurnal yang membahas pemberdayaan pertanian lokal dalam menopang keberhasilan program Food Estate di Kalimantan Tengah. Program food estate bukan hanya sebuah inisiatif pertanian, melainkan juga menjadi elemen sentral dalam kerangka politik suatu negara. Khususnya, keberhasilan atau kegagalan program ini memiliki dampak yang signifikan pada pandangan politik domestik. Pertama-tama, program food estate kerap menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk mencapai kedaulatan pangan. Di dalam arena politik, keberhasilan dalam

mencapai tujuan ini seringkali dijadikan prestasi politik yang dapat memperkuat posisi pemerintah. Sebaliknya, kegagalan dalam mengelola program ini dapat menciptakan tantangan politik, memicu kritik, dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Aspek politik dari program food estate tidak hanya mencakup pencapaian tujuan spesifik, tetapi juga menyangkut strategi politik pemerintah dalam membangun dukungan dan citra positif. Dalam hal ini, program ini dapat menjadi landasan untuk merancang kebijakan pertanian yang dapat menciptakan dampak positif secara berkelanjutan, menciptakan citra positif bagi pemerintah di mata masyarakat. Keberhasilan dalam mengelola program ini juga dapat memperkuat legitimasi politik pemerintah di mata pemilih, sementara kegagalan dapat mengakibatkan keraguan dan ketidakpercayaan.

Selain itu, ketidakberhasilan program food estate dapat menciptakan ketegangan politik, khususnya terkait konflik agraria. Kekurangan perencanaan yang matang dalam pemilihan lokasi dan pemahaman atas faktor-faktor sosial dan geografis dapat menciptakan gesekan antara pemerintah, petani, dan pemilik tanah. Oleh karena itu, keseimbangan antara tujuan politik dan pertimbangan praktis serta kebutuhan masyarakat menjadi krusial untuk kesuksesan program food estate dan stabilitas politik yang berkelanjutan.

Program food estate memiliki dampak yang sangat signifikan dalam konteks politik dan masyarakat di suatu negara. Secara politik, program ini sering dijadikan sebagai elemen utama untuk mencapai kedaulatan pangan, sebuah agenda penting yang mendapatkan perhatian tinggi dari pemerintah. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program ini memiliki potensi besar untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Di sisi masyarakat, program food estate memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan petani. Keberhasilan dapat meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan akses mereka terhadap hasil pertanian. Sebaliknya, kegagalan program dapat berdampak negatif pada kondisi sosial dan ekonomi petani, menciptakan ketidakpuasan dan potensi ketegangan di tingkat masyarakat lokal. Selain itu, pembentukan lapangan kerja baru di sektor pertanian oleh program ini dapat memberikan dampak pada ketenagakerjaan, dan kondisi pekerjaan serta hubungan antara pengusaha dan pekerja dapat mencerminkan opini masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Aspek lingkungan juga menjadi perhatian utama masyarakat terkait program food estate. Dampak negatif seperti deforestasi, hilangnya habitat, dan perubahan iklim dapat memicu keprihatinan dan penolakan dari masyarakat yang sadar akan isu lingkungan. Oleh karena itu, dukungan masyarakat terhadap program ini dapat tergantung pada sejauh mana pemerintah mengakomodasi kepentingan dan aspirasi mereka, terutama dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program food estate (Rasman et al., 2023) juga menjadi faktor penting. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat membangun dukungan publik yang lebih solid dan mengurangi potensi konflik. Ini mencerminkan pendekatan inklusif yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan program dan menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, keberhasilan program food estate tidak hanya terukur dari aspek produksi pangan semata, melainkan juga dari bagaimana program tersebut merespons dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang menjadi pihak terdampak. Akhirnya antara masyarakat dan politik dalam konteks program food estate menunjukkan hubungan yang erat dan kompleks. Program ini tidak hanya menjadi bagian dari agenda politik untuk mencapai kedaulatan pangan, tetapi juga memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program ini dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, menciptakan dinamika sosial dan ekonomi yang signifikan. Di sisi politik, program food estate sering menjadi alat untuk mencapai tujuan strategis, seperti kedaulatan pangan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan program ini dapat memperkuat legitimasi politik pemerintah, sementara kegagalan dapat menciptakan

tantangan politik dan tekanan dari masyarakat. Pemilihan dan implementasi kebijakan yang bijaksana menjadi kunci dalam mempertahankan dukungan politik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Di sisi masyarakat, dampak program food estate dirasakan secara langsung melalui kesejahteraan petani, penciptaan lapangan kerja, dan dampak lingkungan. Tingkat keberhasilan program ini memainkan peran kunci dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan petani, kondisi pekerjaan, dan dampak lingkungan membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan dapat menjadi sumber kepuasan atau ketidakpuasan yang dapat menciptakan dinamika sosial yang signifikan. Dalam upaya mencapai kesuksesan program food estate, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program menjadi kunci. Melibatkan masyarakat membangun dukungan publik yang lebih solid, mengurangi potensi konflik, dan menciptakan kebijakan yang lebih berkelanjutan serta sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, kesimpulan utama adalah bahwa hubungan yang saling mempengaruhi antara masyarakat dan politik menjadi kritis dalam keberhasilan program food estate, dan pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi esensial untuk mencapai hasil yang positif dan berkelanjutan.

Dampak Dari *Food Estate*

Dalam implementasi kebijakan “Food Estate” di Indonesia tentu diharapkan dapat menghasilkan output yang akan bermanfaat bagi negara serta masyarakat. Dampak yang diharapkan dari berjalannya program “Food Estate” ini diantaranya seperti untuk meningkatkan produksi pangan khususnya pada saat pandemi Covid-19 sehingga akan mencapai swasembada pangan. Kemudian, program “Food Estate” ini diharapkan akan berdampak kepada masyarakat secara luas, bagi petani program ini akan berdampak guna meningkatkan kesejahteraan mereka dengan adanya peluang pekerjaan dan peningkatan pendapatan mereka. Program “Food Estate” ini juga akan berdampak dalam mengurangi ketergantungan impor sehingga akan mengurangi beban negara. Dampak-dampak tersebut yang kemudian menjadi harapan bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan “Food Estate” di Indonesia.

Pada kenyataannya, khususnya di Kalimantan Tengah, implementasi program “Food Estate” ini mendapat berbagai dampak yang kritis dan kontroversial. Beberapa dampak dari implementasi kebijakan “Food Estate” di provinsi Kalimantan Tengah diantaranya yaitu, program “Food Estate” ini berdampak terhadap rusaknya lingkungan karena adanya pembukaan lahan yang bersifat merusak seperti dilakukannya proses pembukaan lahan tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada petani dan masyarakat setempat. Hal tersebut juga kemudian mempengaruhi pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap berjalannya program “Food Estate” ini karena mereka merasa tidak dilibatkan oleh pemerintah. Tidak adanya evaluasi dari kegagalan program “Food Estate” di Kalimantan Tengah juga berdampak pada terjadinya pemborosan sumber daya dan investasi karena pemerintah tidak melakukan evaluasi serta bersikap seakan-akan acuh terhadap gagalnya implementasi program “Food Estate” di Kalimantan Tengah. Penting untuk dicatat bahwa pandangan mengenai program kebijakan “Food Estate” ini mungkin berbeda dan penilaian dampaknya mungkin bergantung pada berbagai faktor seperti implementasi, pengelolaan, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Pentingnya evaluasi secara teliti dan melibatkan partisipasi dari masyarakat tentu akan membantu mengurangi dampak negatif dan meningkatkan keberlanjutan program “Food Estate” khususnya di Kalimantan Tengah.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam tulisan ini yaitu implementasi dari program Food Estate di Kalimantan Tengah telah menghadapi banyak tantangan dan masalah yang telah dijelaskan di atas. Namun, untuk menjaga keberlanjutan implementasi program kebijakan ini dan menemukan solusi yang tepat, beberapa langkah perlu diambil. Pertama-tama, penting untuk memahami hubungan antara program kebijakan Food Estate dan politik. Program kebijakan ini memiliki dampak politik yang signifikan karena menyangkut hak-hak masyarakat lokal, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, serta konsep demokrasi. Kegagalan dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan warga dan berpotensi memicu konflik sosial. Oleh karena itu, solusi politik yang penting adalah memperbaiki transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, serta menghormati hak milik tanah masyarakat setempat. Solusi kedua adalah dalam hal perlindungan lahan dan keberlanjutan pangan. Keberlanjutan pangan di Kalimantan Tengah sangat penting, mengingat perubahan iklim dan peningkatan populasi. Program Food Estate seharusnya memberikan solusi untuk menjaga ketahanan pangan. Namun, solusi ini haruslah berkelanjutan. Untuk itu, perlu dilakukan studi kelayakan lahan yang komprehensif sebelum melanjutkan pembukaan lahan. Pemerintah harus memastikan bahwa lahan yang dipilih benar-benar sesuai untuk pertanian dan tidak akan merusak lingkungan, termasuk hutan dan lahan gambut yang sangat berharga.

Selanjutnya, dalam hal infrastruktur irigasi dan jalan, perlu adanya investasi yang tepat untuk mendukung keberlanjutan program kebijakan Food Estate. Infrastruktur yang baik akan membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Namun, pengembangan infrastruktur harus memperhatikan teknologi yang sesuai, seperti irigasi yang efisien, dan ketersediaan benih yang berkualitas. Dalam konteks ekonomi dan sosial, program Food Estate juga harus mendukung kehidupan masyarakat lokal. Petani harus diajak untuk berpartisipasi dalam program ini, terutama mengingat dampak pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi. Pengambilan lahan harus diatur dengan adil, termasuk ganti rugi yang sesuai bagi pemilik tanah yang terdampak. Hal ini akan menghindari konflik dan ketidakpuasan di masyarakat.

Penting juga untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi program Food Estate. Greenpeace telah mengemukakan keprihatinan mereka terkait dengan dampak lingkungan, dan pemerintah harus berusaha untuk mengatasi permasalahan ini. Evaluasi yang berkala akan membantu memastikan bahwa program ini berjalan sesuai rencana dan tidak merusak lingkungan serta tidak mengubah pola pertanian nasional secara negatif. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan implementasi kebijakan Food Estate di Kalimantan Tengah dapat menjadi lebih berkelanjutan, mendukung ketahanan pangan, dan menghormati hak serta kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah harus memperbaiki tindakan mereka untuk menghindari kegagalan program ini dan menghasilkan hasil yang positif bagi Kalimantan Tengah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami ucapkan secara mendalam kepada Bapak Dr. Nurdin, S.Pd.M.Si. atas bimbingan, arahan, dan masukan konstruktifnya. Saya sangat beruntung dapat belajar dibawah bimbingan yang begitu berharga. Kemudian, Saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Kelompok 1 atas kontribusi yang luar biasa dalam menyukseskan penyusunan makalah ini. Tanpa dedikasi dan kerja sama mereka, pencapaian ini tidak akan sejauh ini.

DAFTAR PUSTAKA.

Elizabeth, R. G. (2019). Peningkatan Partisipasi Petani, Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kearifan Lokal Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 4(2), 48–61. <https://doi.org/10.24198/agricore.v4i2.26509>

- Izzati, A. N., & Gustiawati, B. L. (2022). *Izzati, A. N., & Gustiawati, B. L. (2022). Ecoprofit. 1(1), 59–76. Ecoprofit. 1(1), 59–76.*
- Janti, G. I. (2016). PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN PANGAN WILAYAH (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.9845>
- Mahardhika, O., Azkar, N., & Ariyani, E. (2023). Implementasi Program Food Estate Di Desa Bahaur Tengah, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.20527/jpp.v5i1.8018>
- Mulyono, J. (2023). Implementasi Program Pengembangan Food Estate Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 7(1), 13–28. <https://doi.org/10.37145/jak.v7i1.599>
- Nurleni, E. (2021). Konstelasi Narasi Tentang Ketahanan Pangan Dalam program Food Estate Di Eks Plg Kalimantan Tengah: Dimanakah Narasi *Journal SOSIOLOGI*, IV, 14–25. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JSOS/article/download/3711/2841>
- Septiana. (2021). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Melalui Pendampingan Pembenahan Administrasi Dikawasan Food Estate Provinsi Kalimantan Tengah. *MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 1(2), 107–114. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v1i2.549>
- Sianipar, B., & G Tangkudung, A. (2021). Tinjauan Ekonomi, Politik dan Keamanan Terhadap Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah Sebagai Alternatif Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 235–248. <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i2.479>